

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

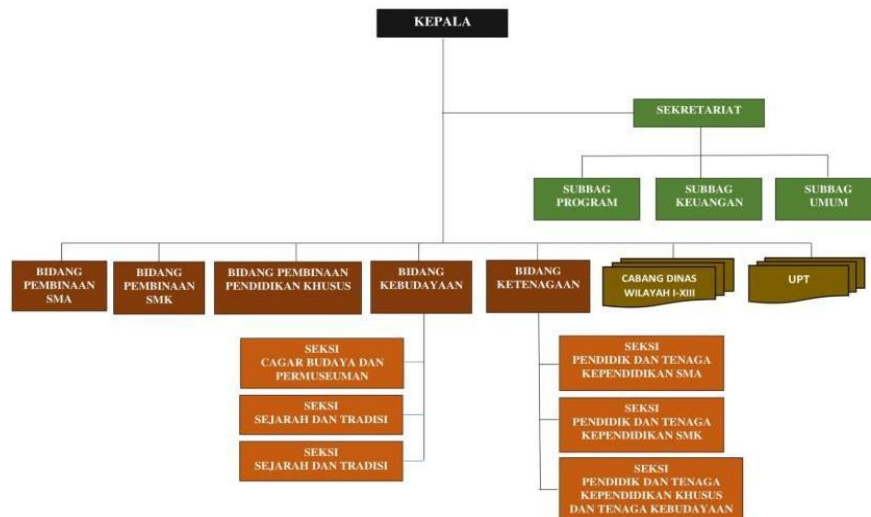
4.1 Profil Instansi



Gambar 4. 1 Logo Dikbud

Sumber : <https://logonesia.com/logo-provinsi-jawa-tengah/>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan daerah sekaligus penyelenggara layanan publik yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki kedudukan sebagai pejabat struktural. Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, namun dalam mekanisme tata kelola pemerintahan, pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah melalui sektor pendidikan dan kebudayaan.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dikbud

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah mengalami beberapa perubahan, baik dalam struktur organisasi maupun lokasi kantor. Sebelum tahun 1982, hanya terdapat satu instansi pemerintah di tingkat provinsi yang menangani sistem pendidikan di Jawa Tengah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Semarang Selatan. Selanjutnya, dibentuk pula Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil P dan K) Jawa Tengah yang berkantor di Jalan Pemuda No. 134 Semarang. Pada tahun 2001, melalui kebijakan pemerintah, kedua instansi tersebut digabung menjadi satu lembaga baru dengan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berkantor di Jalan Pemuda No. 134 Semarang. Namun, karena keterbatasan ruang akibat penggabungan dua instansi, sebagian pegawai juga menempati kantor bekas Departemen Penerangan di Jalan Pemuda No. 136 Semarang. Selanjutnya, pada tahun 2003 terbit PP Nomor 8 Tahun 2003 yang membawa perubahan dalam struktur organisasi dengan penyederhanaan susunan dinas. Perubahan kembali terjadi pada tahun 2008, ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dimekarkan menjadi dua instansi, yaitu Dinas Pendidikan Jawa Tengah yang berkantor di Jalan Pemuda No. 134, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah yang menempati kantor di Jalan Pemuda No. 136 Semarang. Kemudian, melalui PP Nomor 18 Tahun 2016, pemerintah kembali melakukan penataan organisasi. Dengan mempertimbangkan bahwa kebudayaan merupakan bagian integral dari pendidikan, dan sebaliknya pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam pelestarian kebudayaan, maka keduanya kembali diintegrasikan. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan keterpaduan pencapaian sasaran pembangunan pendidikan

dan kebudayaan, mendorong efisiensi anggaran, serta mengakomodasi aspirasi daerah yang sebelumnya telah diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak saat itu, instansi tersebut resmi bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dengan kantor pusat yang tetap berlokasi di Jalan Pemuda No. 134 Semarang hingga sekarang.

Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah memiliki misi yaitu Pendidikan Jawa Tengah yang bermoral, kompetitif dan cinta tanah air, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditopang oleh kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan transparan, akuntabel dan professional yang menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berdaya saing dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dan memiliki visi membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara Pendidikan, menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif dan efisien. Transparan, efektif dan efisien Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan nasional.

4.2 Pendahuluan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah berfokus pada penyusunan buku panduan pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka. Penyusunan buku panduan ini penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pustakawan dalam mengelola dan mengklasifikasikan koleksi sehingga tertata lebih sistematis. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas koleksi serta mendukung pelestarian dan pemanfaatan bahan pustaka sebagai sumber pengetahuan. Panduan yang disusun meninggalkan kontribusi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf pengelola koleksi, serta pustakawan yang menggunakan layanan perpustakaan. Selain itu, dilakukan observasi untuk mengetahui secara langsung proses pengolahan klasifikasi, fasilitas yang tersedia, serta pengalaman pustakawan dalam memanfaatkan koleksi yang telah diklasifikasikan.

Observasi juga dilakukan dengan meninjau kondisi di lapangan guna menggambarkan bagaimana prosedur klasifikasi dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta evaluasi efektivitasnya dalam mendukung kebutuhan informasi

pemustaka. Studi dokumen yang digunakan sebagai rujukan meliputi dokumen internal, laporan kegiatan, serta kebijakan terkait pengelolaan dan klasifikasi koleksi di Perpustakaan Disdikbud. Kajian ini diperkuat dengan sumber bacaan berupa artikel, penelitian terdahulu, data terkini, serta literatur dalam buku-buku yang ditulis oleh ahli di bidang perpustakaan. Gabungan metode ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan serta kebutuhan akan adanya panduan klasifikasi koleksi bahan pustaka yang terstandarisasi

4.3 Deskripsi Data Penelitian

Sub-bab ini menyajikan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Data tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka sebagai upaya memudahkan aksesibilitas layanan di Perpustakaan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, meliputi staf perpustakaan, serta pemustaka, guna memperoleh pandangan mengenai pelaksanaan kegiatan klasifikasi. Observasi turut dilakukan terhadap fasilitas, aktivitas kerja pengolahan klasifikasi, serta sistem layanan informasi yang diterapkan. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana proses klasifikasi koleksi dijalankan, kendala apa saja yang dihadapi, serta sejauh mana proses tersebut mendukung peningkatan kemudahan akses informasi bagi pemustaka. Selain wawancara yang mendalam, observasi langsung juga dilakukan terhadap tahapan pengolahan, mulai dari pemilihan bahan pustaka, penentuan notasi klasifikasi, pencatatan data bibliografis, hingga integrasi ke dalam sistem otomasi perpustakaan. Observasi ini mencakup pula interaksi dengan pemustaka dan staf dalam penggunaan koleksi terklasifikasi.

Selain itu, studi dokumen dilakukan untuk menelusuri data pendukung yang dapat memperkuat validitas hasil penelitian, seperti pedoman klasifikasi, standar pengolahan, dan laporan capaian kerja perpustakaan. Data tersebut membantu memberikan pemahaman tentang skala serta tingkat keberhasilan program pengolahan klasifikasi yang telah dilaksanakan. Penyajian hasil temuan lapangan ini penting sebagai dasar analisis dalam menilai efektivitas penyusunan buku panduan pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka, baik dari sisi pelestarian informasi maupun peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

4.4 Hasil Penelitian

Pada sub bab ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasan yang diperoleh melalui rangkaian proses yang telah dilaksanakan. Tujuan utama dari penyajian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun pada bab sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan tiga sumber data utama, yaitu hasil wawancara, observasi, serta analisis berdasarkan kerangka teori yang relevan. Wawancara dilakukan dengan pustakawan, staf pengolahan koleksi, serta pemustaka yang berada di lingkungan Perpustakaan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Melalui wawancara tersebut diperoleh informasi mengenai praktik pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka, kendala yang dihadapi, serta persepsi pemustaka terhadap sistem klasifikasi yang diterapkan. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana proses klasifikasi berjalan, baik dari sisi teknis maupun dari pengalaman pengguna dalam memanfaatkan koleksi. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data faktual terkait fasilitas, sarana pendukung, serta sistem layanan pengolahan koleksi yang tersedia di perpustakaan. Observasi ini berfungsi sebagai data pelengkap hasil wawancara karena mampu memperlihatkan kondisi nyata yang tidak selalu dapat diungkapkan oleh informan secara verbal.

Pembahasan dalam bab ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih jelas, mendalam, dan terarah. Dengan demikian, penyajian hasil penelitian ini dapat mendukung tujuan utama penyusunan Buku Panduan Pengolahan Klasifikasi Koleksi Bahan Pustaka pada Perpustakaan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah

4.4.1 Kondisi aktual pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka

Sistem klasifikasi perpustakaan merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang dirancang untuk menyusun buku serta berbagai sumber informasi secara teratur dan sistematis. Melalui pengelompokan berdasarkan topik, bidang ilmu, maupun tingkat kedalaman materi, koleksi dapat ditata sedemikian rupa sehingga pemustaka lebih mudah menelusuri dan menemukan bahan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya penyusunan yang metodis ini, setiap buku atau sumber daya informasi tidak

hanya tersimpan secara rapi di rak, tetapi juga terorganisir dengan baik, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat, efisien, dan terarah.

1. Tujuan sistem klasifikasi di perpustakaan dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah

Tujuan utama dari klasifikasi ialah menyusun dan menata bahan pustaka dengan menggunakan suatu sistem atau aturan tertentu. Dengan cara ini, setiap koleksi dapat ditempatkan secara teratur sehingga memudahkan pemustaka dalam menemukan kembali bahan yang dibutuhkan, sekaligus memudahkan petugas perpustakaan untuk mengembalikan koleksi tersebut ke lokasi penyimpanannya yang tepat. *“ya tujuan klasifikasi itu untuk memudahkan pengguna jika ingin mencari buku yang ingin dibaca, jadi adanya klasifikasi agar memudahkan pengguna”* (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025) tujuan klasifikasi di perpustakaan yaitu untuk mempermudah pemustaka dalam menemukan bahan pustaka atau koleksi yang di cari (Olga 2023)

2. Sistem klasifikasi bahan pustaka

Klasifikasi merupakan bagian penting dalam kegiatan temu kembali informasi di perpustakaan. Oleh karena itu, pemilihan sistem klasifikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi maupun kebutuhan pengguna. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem klasifikasi antara lain kesesuaian dengan perkembangan teknologi, jenis koleksi, serta kemudahan akses bagi pemustaka (Hikmah et al., 2025). Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan staff pengelola perpustakaan *“kalau sistem itu tidak tahu mas, biasanya saya menyerahkan ke anak-anak magang untuk melakukan klasifikasi”* (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025) selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa magang, *“biasanya kita klasifikasi nyari di google saja, misal search buku dengan judul ini klasifikasinya apa, lalu kita masukan ke dalam slims, jadi tidak pakai sistem klasifikasi”* (wawancara dengan ayora pada tanggal 9 september 2025)

Tabel 4. 1 nomer klasifikasi perpustakaan dikbud

No	Jenis Koleksi	Klasifikasi
1	Karya Umum	000
2	Filsafat dan Psikologi	100
3	Agama	200
4	Ilmu Sosial	300
5	Bahasa	400
Ilmu pengetahuan		
6	Alam dan Matematika	500
7	Teknologi dan Ilmu Terapan	600
8	Seni, Hiburan dan Olahraga	700
9	Sastra	800
10	Geografi dan Sejarah	900

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa klasifikasi yang dibuat agar memudahkan dan memperlancar temu kembali informasi di perpustakaan tersebut. Dikarenakan kondisi bahan pustaka yang tidak teratur maka mahasiswa magang menyusun no klasifikasi agar terorganisir dengan baik.

3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan klasifikasi bahan pustaka

Kegiatan klasifikasi bahan pustaka merupakan aktivitas penting dalam pengelolaan koleksi, karena melalui proses ini setiap bahan pustaka dianalisis untuk diberikan nomor klasifikasi atau notasi yang sesuai dengan subjeknya. Penentuan nomor klasifikasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan membutuhkan pemahaman isi dokumen melalui berbagai komponen penunjang yang terdapat di dalamnya. Secara umum, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam kegiatan klasifikasi bahan pustaka adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis judul

Judul sering kali menjadi petunjuk pertama mengenai isi sebuah dokumen. Namun, judul tidak selalu mencerminkan secara akurat keseluruhan topik atau ruang lingkup

yang dibahas. Oleh karena itu, pengklasir harus menjadikannya sebagai acuan awal yang tetap perlu diverifikasi melalui elemen lain.

b. Menelaah kata pengantar

Kata pengantar biasanya memuat maksud, tujuan penulisan, serta gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. Dari bagian ini, pengklasir dapat memperoleh gambaran mengenai latar belakang penulisan, sasaran pembaca, serta arah isi dokumen.

c. Memeriksa daftar isi

Daftar isi menyajikan struktur dokumen secara sistematis, mulai dari bab hingga subbab. Bagian ini dianggap sumber yang lebih dapat dipercaya karena menampilkan keseluruhan cakupan pembahasan dalam buku. Dengan menelaah daftar isi, pengklasir dapat dengan mudah memahami kerangka topik dan hubungan antarbagian.

d. Mempelajari pendahuluan

Pendahuluan memberikan sudut pandang penulis terhadap subjek yang dibahas, termasuk ruang lingkup, tujuan, serta permasalahan yang diangkat. Informasi ini membantu pengklasir menempatkan dokumen pada klasifikasi yang tepat.

e. Membaca isi dokumen

Agar analisis tidak hanya bersifat parsial, pengklasir dianjurkan membaca isi dokumen secara bertahap, bab demi bab. Cara ini memungkinkan penentuan subjek utama dan subjek tambahan secara lebih akurat.

f. Menelaah bibliografi

Daftar pustaka atau bibliografi berisi rujukan yang digunakan penulis dalam menyusun dokumen. Melalui bibliografi, pengklasir dapat menelusuri bidang kajian, pendekatan keilmuan, serta sumber otoritatif yang menjadi dasar isi buku. Untuk memperkaya pemahaman, tinjauan atau ulasan buku yang dimuat dalam surat kabar dan majalah juga dapat dijadikan tambahan pertimbangan.

Apabila seluruh tahapan klasifikasi telah dilakukan namun nomor klasifikasi yang sesuai belum juga dapat ditentukan, pustakawan sebaiknya meminta bantuan dari tenaga ahli atau pakar subjek. Keterlibatan ahli subjek sangat membantu untuk memastikan ketepatan klasifikasi dan menjamin bahwa koleksi ditempatkan sesuai dengan bidang kajiannya. Kolaborasi semacam ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan akurasi dan kualitas layanan temu kembali informasi di perpustakaan (Zahra et al., 2025). *“sebelum melakukan klasifikasi, biasanya dikumpulkan dulu berdasarkan judul*

saja, kalau buku umum ya ditaruh di rak buku umum, tidak ada klasifikasi spesifik”
(wawancara dengan ayora pada tanggal 9 september 2025)



Gambar 4. 3 rak koleksi umum

(sumber pribadi, 2025)

Dalam menentukan isi sebuah bahan pustaka, pustakawan dituntut memahami terlebih dahulu mengenai apa yang menjadi pokok pembahasan dokumen tersebut, setidaknya dalam lingkup umum. Meskipun pustakawan tidak harus menjadi pakar dalam bidang tertentu, mereka tetap perlu memiliki pengetahuan mengenai sifat, struktur, serta hubungan antarbidang ilmu. Hal ini penting agar analisis subjek dapat dilakukan dengan tepat. Untuk menunjang kegiatan ini, ada dua hal mendasar yang harus dipahami, yaitu jenis konsep dan jenis subjek. Dengan memahami keduanya, pustakawan akan lebih terbantu dalam menetapkan subjek utama dari suatu dokumen atau bahan pustaka (Setiadi 2025).

4. Klasifikasi yang digunakan pada perpustakaan dikbud

Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan koleksinya menggunakan sistem klasifikasi artifisial sebagai langkah awal penataan. Klasifikasi artifisial adalah metode pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri-ciri fisik luar, bukan berdasarkan isi atau subjek koleksi. “*Di perpustakaan ini, klasifikasi diaplikasikan dengan mengelompokkan koleksi sesuai dengan jenis atau formatnya, seperti buku teks, laporan , karya ilmiah, majalah,*

maupun terbitan pemerintah” (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025). Selain itu, aspek lain seperti bahasa, tahun terbit, dan bentuk fisik koleksi juga menjadi pertimbangan dalam proses pengelompokan. *“Penggunaan klasifikasi seperti tersebut memiliki tujuan praktis, yaitu memudahkan pengelola perpustakaan dalam menata, mencatat, serta menginventarisasi koleksi. Dengan demikian, proses identifikasi awal terhadap bahan pustaka menjadi lebih cepat dan sistematis”* (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025).



Gambar 4. 4 rak koleksi majalah

(sumber pribadi, 2025)

Hal ini juga memudahkan pengguna untuk mengenali jenis koleksi yang tersedia, terutama ketika mencari bahan pustaka berdasarkan format tertentu. Meskipun tidak menunjukkan keterkaitan isi antar koleksi, klasifikasi artifisial tetap menjadi dasar penting dalam sistem pengelolaan perpustakaan. Setelah penataan fisik dilakukan melalui klasifikasi artifisial, langkah berikutnya adalah pengelompokan berdasarkan klasifikasi fundamental yang berorientasi pada subjek. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada staff mengenai mengapa tidak menggunakan sistem klasifikasi DDC. *“ibu tidak tahu cara menggunakannya, maka dari itu kita menggunakan sistem klasifikasi sendiri yang ibu tahu dan bisa saja”* (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025)

Klasifikasi ini disusun tanpa mengacu pada skema klasifikasi baku yang sudah ada, seperti Dewey Decimal Classification (DDC), maupun sistem klasifikasi lainnya. Tujuan dari klasifikasi tersebut bukanlah untuk perencanaan jangka panjang, melainkan sekadar untuk menata bahan pustaka di rak agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Hingga saat ini, skema klasifikasi tersebut masih dipakai dan belum pernah mengalami pengembangan sejak pertama kali dibuat. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, skema ini memiliki banyak kekurangan, khususnya karena tidak dilengkapi dengan pedoman yang jelas dan sistematis sebagaimana yang berlaku di perpustakaan pada umumnya.



Gambar 4. 5 aplikasi EDDC

(sumber pribadi, 2025)

5. Jenis koleksi yang diklasifikasi

Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam koleksi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan bidang ilmu dan cabang pengetahuan. Koleksi tersebut disediakan untuk mendukung kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, serta pengembangan wawasan masyarakat. Adapun jenis koleksi yang tersedia meliputi:

a. Karya umum

Koleksi ini berisi bahan pustaka dengan cakupan umum yang mencakup ensiklopedia, kamus, direktori, bibliografi, serta karya referensi lain yang digunakan untuk memperoleh informasi dasar dan umum.

b. Filsafat dan psikologi

Koleksi pada bidang ini memuat literatur yang membahas pemikiran filsafat, logika, etika, serta karya-karya mengenai psikologi teoritis maupun terapan, termasuk pengembangan kepribadian, pendidikan mental, dan konseling.

c. Agama

Bagian ini berisi koleksi yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Di dalamnya terdapat kitab suci, tafsir, buku tentang sejarah agama, pendidikan keagamaan, serta kajian-kajian teologis.

d. Ilmu sosial

Koleksi ilmu sosial mencakup buku-buku tentang sosiologi, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, administrasi, hingga ilmu komunikasi.

e. Bahasa

Koleksi bidang bahasa berisi buku tata bahasa, linguistik, kamus, serta literatur yang membahas pengajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing.

f. Ilmu pengetahuan alam dan matematika

Koleksi ini memuat literatur mengenai biologi, fisika, kimia, astronomi, geologi, hingga matematika. Bahan pustaka dalam kelompok ini digunakan untuk memperdalam pemahaman di bidang sains dasar.

g. Teknologi dan ilmu terapan

Bagian ini berisi koleksi yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan praktis, seperti teknik, pertanian, kesehatan, komputer, industri, serta teknologi informasi.

h. Seni,hiburan dan olahraga

Koleksi ini mencakup buku tentang seni rupa, seni musik, seni pertunjukan, perfilman, serta olahraga. Koleksi bidang ini disediakan untuk menunjang apresiasi seni, kebudayaan, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang aktivitas fisik dan rekreasi.

i. Sastra

Koleksi sastra berisi karya-karya fiksi, puisi, drama, novel, cerita rakyat, serta karya sastra klasik maupun modern..

j. Geografi dan sejarah

Koleksi ini memuat buku tentang ilmu bumi, peta, geologi regional, sejarah Indonesia, sejarah dunia, serta biografi tokoh penting.

4.4.2 Kendala utama dalam proses klasifikasi

Perpustakaan pada hakikatnya memiliki peranan yang sangat penting sebagai pusat informasi, sumber pengetahuan, dan wahana pembelajaran sepanjang hayat. Sebuah perpustakaan akan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal apabila seluruh sistem pendukung, sumber daya manusia, serta kebutuhan operasional dapat dipenuhi secara menyeluruh. Hal ini mencakup aspek manajemen, ketersediaan koleksi yang relevan, pemanfaatan teknologi informasi, serta fasilitas fisik yang nyaman dan memadai. Namun, berdasarkan hasil pengamatan penulis, Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan perannya. Kendala tersebut antara lain terkait keterbatasan koleksi, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan, serta masih perlunya peningkatan kapasitas tenaga pengelola. Situasi ini menyebabkan peran perpustakaan sebagai pusat layanan informasi pendidikan dan kebudayaan belum sepenuhnya terwujud secara maksimal.

a. Tenaga pustakawan

Pustakawan memiliki peran strategis dalam mengolah bahan pustaka, sebab seluruh proses pengelolaan, mulai dari pengklasifikasian, katalogisasi, hingga penataan koleksi, membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan tenaga kerja yang optimal. Apabila pustakawan dapat bekerja secara maksimal, maka setiap bahan pustaka dapat dikelola dengan baik sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pengelola perpustakaan dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah bahwa kendala yang dihadapi adalah :

“tenaga pengelola perpustakaan hanya ada satu, maka dari itu pengelola tidak bisa menjalankan tugas dengan efisien dikarenakan petugas perpustakaan juga punya tugas selain di perpustakaan yaitu mengelola arsip” (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025) hal tersebut berpengaruh dengan proses klasifikasi jika ada koleksi baru, karena keterbatasan sumber daya manusia akan berpengaruh pada kinerja (Amanda dan hanif 2023)



Gambar 4. 6 wawancara dengan staf

(sumber pribadi, 2025)

b. Sarana dan prasarana

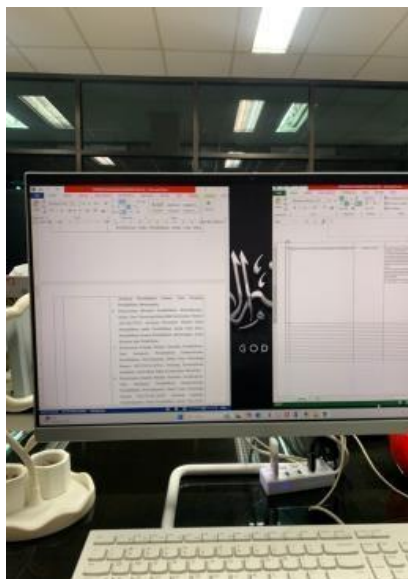
Sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan utama di Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah rak dan ruang penyimpanan yang terbatas membuat koleksi buku sering menumpuk, *"karena tidak ada staff yang menetap di perpustakaan, jadi kalau ada koleksi baru biasanya tidak langsung dicatat dan juga ditata, karena juga sudah tidak ada ruang di rak, staff belum memilah buku yang layak di baca dan tidak"* (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025) sehingga penataannya tidak teratur. Selain itu, ketersediaan komputer dan perangkat lunak katalogisasi yang minim juga



Gambar 4. 7 koleksi baru yang belum di klasifikasi

(sumber pribadi, 2025)

menjadi hambatan dalam mengelola bahan pustaka. Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses klasifikasi, yaitu kegiatan penting untuk mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan subjek dan nomor klasifikasi tertentu seperti Klasifikasi Desimal Dewey (DDC). Idealnya, klasifikasi dilakukan dengan dukungan sistem katalog digital agar koleksi dapat ditata secara sistematis dan mudah ditemukan pengguna. Namun, karena sarana masih terbatas, klasifikasi harus dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu lama, rentan terjadi kesalahan, dan tidak efisien. Akibatnya, pengguna kesulitan dalam menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan, dan layanan perpustakaan belum dapat berjalan optimal dalam menunjang pendidikan serta kebudayaan. *“kesulitan karena komputer untuk melakukan penginputan bahan pustaka berbeda ruangan dengan perpustakaan, sehingga staff kesulitan dalam membawa buku kesana kemari jika ingin melakukan penginputan buku”* (wawancara dengan ibu marni pada tanggal 9 september 2025) maka dari itu proses klasifikasi menjadi terhambat dan melakukan klasifikasi secara manual, dengan disediakannya peralatan yang cukup dan memanfaatkan perkembangan teknologi akan memudahkan kegiatan kalsifikasi (fadhullah dan Christiani 2019)



Gambar 4. 8 perangkat yang digunakan untuk klasifikasi

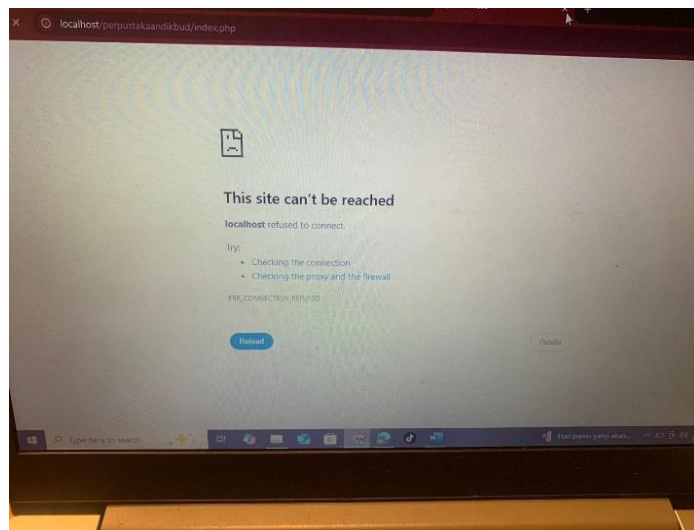
(sumber pribadi, 2025)



Gambar 4. 9 buku manual untuk klasifikasi

(sumber pribadi, 2025)

kendala lainnya juga dirasakan oleh mahasiswa magang dikarenakan “*jika ingin menginput lewat laptop harus satu server dengan komputer utama di ruangan tersebut, jika komputer tidak terhubung maka mahasiswa magang tidak bisa mengakses slims tersebut dikarenakan belum ter hosting*” (wawancara dengan ayora dan fatma mahasiswa magang pada tanggal 9 september)



Gambar 4. 10 website slims yang bermasalah

(sumber pribadi, 2025)

4.4.3 Kebutuhan penyusunan buku panduan klasifikasi

a. Urgensi penyusunan buku panduan

Penyusunan buku panduan klasifikasi menjadi kebutuhan mendesak karena dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut. Buku panduan berfungsi sebagai standar kerja yang seragam sehingga setiap pustakawan memiliki acuan yang sama dalam menata koleksi. Dengan adanya panduan yang disusun secara kontekstual, kebutuhan untuk mengakomodasi koleksi dapat terpenuhi, sehingga pustakawan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan bahan pustaka. Selain itu, panduan ini akan meningkatkan efisiensi kerja karena pustakawan dapat langsung mengacu pada petunjuk yang tersedia tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk menentukan nomor klasifikasi. *“Keberadaan buku panduan juga akan memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan kepada pengguna, karena koleksi yang tertata dengan rapi dan konsisten akan lebih mudah ditemukan”*. (wawancara dengan ayora dan fatma mahasiswa magang pada tanggal 9 september) Tidak hanya itu, panduan juga dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi pustakawan baru. Dengan adanya pedoman yang tertulis dan sistematis, pustakawan pemula dapat belajar secara mandiri dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses klasifikasi.

b. Manfaat penyusunan buku panduan

Manfaat penyusunan buku panduan klasifikasi dapat dirasakan oleh pustakawan, perpustakaan, maupun pengguna. Bagi pustakawan, panduan ini akan memberikan acuan kerja yang jelas sehingga kesalahan dalam pengklasifikasian dapat diminimalkan. Proses klasifikasi akan menjadi lebih cepat dan efisien, serta dapat digunakan sebagai sarana pelatihan bagi pustakawan baru. Bagi perpustakaan, kehadiran panduan akan meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan koleksi. Proses kerja yang lebih efisien juga akan membantu menghemat waktu dan sumber daya, sekaligus memperkuat citra perpustakaan sebagai lembaga yang profesional. Selain itu, panduan internal dapat dijadikan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja dan pengembangan sistem pengelolaan informasi. Sementara itu, bagi pengguna, panduan klasifikasi akan berdampak pada peningkatan pengalaman dalam menelusuri dan menemukan koleksi. Koleksi yang tersusun dengan rapi akan mempermudah pencarian informasi sehingga pengguna merasa lebih puas dengan layanan yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap

perpustakaan juga akan meningkat karena layanan yang ditawarkan lebih terarah, mudah diakses, dan mendukung kebutuhan literasi informasi.

c. Harapan dan Implementasi

Dengan adanya buku panduan klasifikasi, diharapkan seluruh koleksi di Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat ditata secara konsisten, baik untuk koleksi umum maupun koleksi khas daerah. Panduan ini idealnya mencakup aturan teknis penggunaan sistem klasifikasi seperti DDC yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, contoh-contoh klasifikasi koleksi khusus, serta prosedur operasional standar yang mudah dipahami. Dalam jangka panjang, implementasi buku panduan ini akan mendukung modernisasi manajemen perpustakaan. Panduan yang terintegrasi dengan sistem otomasi perpustakaan akan mempermudah proses digitalisasi dan temu kembali informasi. Dengan demikian, perpustakaan dapat berkembang menjadi pusat informasi yang lebih relevan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berperan aktif dalam mendukung pendidikan serta pelestarian budaya di Jawa Tengah.

4.5 Analisis Data

Pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya telah memberikan manfaat bagi pemustaka dalam mempermudah penelusuran dan akses informasi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait kelengkapan metadata, konsistensi penerapan standar klasifikasi, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung pengelolaan koleksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun langkah awal sudah baik, pengolahan klasifikasi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat berfungsi sebagai sistem yang sistematis, inklusif, dan sesuai dengan standar perpustakaan modern.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Pengelolaan klasifikasi masih sangat bergantung pada jumlah dan kompetensi pustakawan, sementara fasilitas teknis yang tersedia belum sepenuhnya memadai. Dengan demikian, meskipun manfaat

pengolahan klasifikasi sudah dirasakan oleh pemustaka, terdapat hambatan yang membuat layanan ini belum mampu berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah buku panduan yang dapat menjadi pedoman baku untuk meningkatkan ketepatan, konsistensi, serta kualitas pengelolaan klasifikasi koleksi. Dari keseluruhan hasil observasi ada beberapa temuan yang menjawab rumusan masalah, diantaranya :

1. Kondisi aktual menunjukkan bahwa pengolahan klasifikasi sudah membantu akses informasi, tetapi masih ditemui ketidaklengkapan data klasifikasi dan metadata, sehingga sistem belum sepenuhnya inklusif dan sistematis.
2. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai teknis klasifikasi, serta sarana pendukung yang belum lengkap, sehingga efektivitas pengelolaan koleksi menjadi terbatas.
3. Kebutuhan penyusunan buku panduan muncul karena walaupun manfaat klasifikasi sudah dirasakan pemustaka, masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi layanan. Dengan adanya buku panduan, diharapkan terdapat acuan baku yang dapat meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan kualitas pengelolaan klasifikasi koleksi di Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

4.6 Penyusunan Buku Panduan

4.6.1 Pra Produksi

Dalam tahap pra-produksi penyusunan Buku Panduan Pengolahan Klasifikasi Koleksi Bahan Pustaka pada Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, penulis menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung kelancaran proses penulisan. Perangkat keras yang digunakan berupa laptop, yang berfungsi sebagai sarana utama dalam mengetik naskah, mengolah data, serta merancang tampilan buku panduan. Sementara itu, perangkat lunak yang digunakan adalah aplikasi desain Canva. Aplikasi ini dipilih karena memiliki fitur yang mudah digunakan, menyediakan beragam elemen desain seperti template, tipografi, ikon, serta ilustrasi yang memudahkan penulis dalam menyusun tata letak buku panduan agar tampil lebih menarik dan komunikatif. Selain menyiapkan perangkat penunjang, penulis juga melakukan koordinasi dengan pihak Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, khususnya dengan staff yang bertanggung jawab di bidang pengolahan koleksi bahan pustaka. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan isi buku panduan sesuai dengan kebutuhan institusi, mengikuti standar pengolahan klasifikasi koleksi yang berlaku, serta menjaga kesinambungan komunikasi hingga buku panduan ini selesai disusun. Dengan adanya perencanaan pra-produksi yang matang, penyusunan buku panduan diharapkan dapat menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga bermanfaat secara praktis sebagai acuan kerja bagi pustakawan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

4.6.2 Produksi

Pada tahap penyusunan Buku Panduan Pengolahan Klasifikasi Koleksi Bahan Pustaka pada Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, penulis menempuh beberapa tahapan penting yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah analisis permasalahan, di mana penulis melakukan identifikasi terhadap kendala yang terjadi dalam proses pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka di lingkungan Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Analisis ini dilakukan dengan cara mengamati praktik yang berjalan, mengumpulkan data dari pustakawan, serta mengkaji kelemahan maupun hambatan yang sering muncul dalam kegiatan klasifikasi. Hasil dari analisis permasalahan ini menjadi dasar utama dalam menentukan fokus dan ruang lingkup isi buku panduan.

Tahap berikutnya adalah proses produksi buku panduan, yang melibatkan beberapa langkah teknis. Pertama, penulis mengadakan diskusi dengan pustakawan yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan koleksi untuk mendapatkan masukan mengenai prinsip dan prosedur klasifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan institusi. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan isi buku panduan dengan standar yang berlaku, sehingga panduan dapat digunakan secara praktis dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, penulis melakukan pemilihan desain visual, yaitu menentukan tata letak, format penulisan, tipografi, serta elemen grafis yang mendukung penyajian informasi agar lebih mudah dipahami. Pemilihan desain ini dilakukan secara hati-hati agar tampilan buku panduan tetap profesional, informatif, dan sesuai dengan karakter dokumen resmi perpustakaan. Ketiga, penulis menelaah hasil diskusi yang telah diperoleh dan mengintegrasikannya ke dalam draf isi buku panduan. Proses ini dilakukan dengan cara

memilah informasi, menyusun ulang bahasa agar sistematis, serta memastikan materi yang dimasukkan benar-benar relevan dengan kebutuhan klasifikasi koleksi. Keempat, dilakukan penyuntingan (editing) baik dari segi isi maupun desain. Dari segi isi, penyuntingan bertujuan memastikan kejelasan konsep, konsistensi istilah, dan ketepatan langkah-langkah klasifikasi yang dituliskan. Sementara dari segi desain, penyuntingan dilakukan untuk memastikan tata letak, struktur visual, serta kelengkapan unsur grafis sesuai dengan standar pen dokumen resmi dan kebutuhan komunikasi visual. Lalu, memasuki tahap berikutnya adalah mengetahui dan menganalisa masalah yang ada di perpustakaan sebagai berikut:

1. Analisis Masalah

Analisis mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya beberapa kendala yang cukup signifikan dalam proses pengolahan klasifikasi koleksi bahan pustaka. Permasalahan pertama adalah keterbatasan pemahaman pustakawan terhadap sistem klasifikasi, seperti *Dewey Decimal Classification (DDC)*, yang sering menimbulkan ketidakseragaman dalam penentuan nomor klasifikasi. Hal ini berdampak pada penempatan koleksi yang tidak konsisten dan berpotensi membingungkan pemustaka ketika melakukan penelusuran. Permasalahan kedua adalah ketiadaan panduan praktis yang dapat dijadikan acuan kerja, sehingga klasifikasi selama ini lebih banyak bergantung pada pengalaman dan interpretasi masing-masing pustakawan. Akibatnya, pustakawan baru atau yang belum terbiasa sering mengalami kesulitan dalam menentukan nomor klasifikasi dengan tepat, sehingga pengolahan koleksi baru menjadi terhambat. Selanjutnya, masalah ketiga adalah belum adanya standar tertulis yang seragam dalam penerapan klasifikasi. Walaupun perpustakaan sudah menggunakan sistem klasifikasi tertentu, praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan dalam penggunaan tabel tambahan, penulisan nomor klasifikasi, maupun pemilihan istilah subjek, sehingga hasil klasifikasi tidak konsisten antar pustakawan. Di samping itu, kurangnya pelatihan dan pembaruan pengetahuan mengenai perkembangan sistem klasifikasi juga menjadi kendala tersendiri. Keseluruhan permasalahan ini menegaskan perlunya sebuah buku panduan yang mampu menghadirkan solusi praktis, berupa langkah-langkah klasifikasi yang jelas, contoh konkret, serta standar tertulis yang seragam. Dengan adanya panduan tersebut,

diharapkan proses klasifikasi dapat dilakukan lebih konsisten, efisien, dan efektif, sehingga kualitas layanan perpustakaan dapat meningkat dan kebutuhan pemustaka dapat terpenuhi secara optimal.

2. Perancangan Buku Panduan

Penyusunan buku panduan ini melalui proses yang cukup kompleks dan terstruktur, mengingat setiap tahapannya harus disesuaikan dengan standar klasifikasi serta pengolahan metadata koleksi pustaka. Untuk itu, penulis merancang panduan teknis yang dapat dijadikan acuan dalam proses klasifikasi koleksi bahan pustaka, sehingga hasil pengolahan dapat konsisten, sistematis, dan sesuai kebutuhan layanan perpustakaan. Rancangan buku panduan ini disusun berdasarkan tahapan-tahapan penting dalam pengolahan klasifikasi, yang dirancang khusus untuk menyesuaikan dengan karakteristik koleksi. Berikut kerangka rancangan panduan teknis klasifikasi koleksi tahun 2025:

1. Kata Pengantar

Bagian kata pengantar berfungsi sebagai pengantar utama yang menjelaskan latar belakang penyusunan buku panduan ini. Di dalamnya, penulis menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan. Selain itu, dijelaskan pula tujuan utama dari penerbitan panduan ini, yaitu sebagai pedoman praktis bagi pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam menerapkan sistem klasifikasi yang seragam dan sesuai standar.

Kata pengantar juga menegaskan pentingnya panduan ini dalam memperkuat tata kelola koleksi secara profesional, sehingga pelayanan kepada pemustaka dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan terarah. Melalui bagian ini, penulis juga membuka ruang bagi kritik dan saran sebagai bentuk komitmen terhadap penyempurnaan panduan di masa mendatang.



Gambar 4. 11 Kata Pengantar

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

2. Pendahuluan

Bagian pendahuluan memberikan landasan konseptual tentang pentingnya klasifikasi dalam pengelolaan perpustakaan. Dijelaskan bahwa perpustakaan berperan sebagai pusat informasi dan sumber belajar, sehingga penataan koleksi yang sistematis menjadi kunci utama kemudahan akses informasi.

Pada bagian ini, diperkenalkan pula latar kebutuhan akan panduan klasifikasi yang terstandar, terutama di tengah meningkatnya ragam koleksi baik cetak maupun digital. Dengan adanya pedoman yang seragam, pustakawan dapat menjaga konsistensi dan ketepatan dalam menempatkan setiap bahan pustaka sesuai subjeknya. Pendahuluan juga menyoroti peran penting Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang menaungi berbagai unit layanan informasi, sehingga penerapan sistem klasifikasi berbasis DDC diharapkan menjadi acuan bersama yang praktis dan mudah diterapkan di semua tingkatan.

pendahuluan

Perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, sumber belajar, dan wahana pelestarian pengetahuan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pengelolaan koleksi bahan pustaka yang baik dan terstruktur menjadi kunci utama agar informasi dapat diakses dengan cepat, tepat, dan mudah oleh pemustaka. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan koleksi adalah proses klasifikasi, yaitu kegiatan mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan subjek dan karakteristik tertentu sehingga koleksi tersusun secara sistematis.

Di era perkembangan informasi yang semakin pesat, keberagaman jenis koleksi baik cetak maupun noncetak menuntut adanya pedoman klasifikasi yang seragam dan sesuai standar. Tanpa panduan yang jelas, pengelolaan koleksi akan sulit dilakukan secara sistematis, yang pada akhirnya dapat menghambat layanan informasi kepada masyarakat.

Salah satu metode klasifikasi yang diakui secara internasional dan paling banyak digunakan di berbagai jenis perpustakaan adalah Dewey Decimal Classification (DDC). Sistem DDC mengelompokkan seluruh bidang ilmu pengetahuan ke dalam sepuluh kelas utama (000–900), yang kemudian dibagi lagi menjadi divisi dan seksi yang lebih spesifik. Pendekatan desimal ini memungkinkan pustakawan menempatkan setiap koleksi sesuai dengan subjeknya secara logis dan konsisten, sehingga memudahkan proses penelusuran informasi bagi pemustaka. Sebagai lembaga yang menaungi penyediaan dan pengembangan layanan informasi di tingkat provinsi, Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memerlukan panduan klasifikasi yang dapat menjadi rujukan praktis sekaligus standar kerja berbasis DDC. Panduan ini tidak hanya mempermudah pustakawan dalam menentukan nomor klasifikasi yang tepat, tetapi juga membantu menjaga konsistensi tata kelola koleksi di seluruh unit layanan, baik pada perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, maupun perpustakaan khusus yang menjadi mitra kerja.

Penyusunan Panduan Klasifikasi Koleksi Bahan Pustaka ini diharapkan dapat menjadi acuan aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan serta selaras dengan edisi terkini DDC yang diakui secara nasional maupun internasional. Dengan adanya panduan ini, kualitas pengelolaan perpustakaan akan meningkat, layanan kepada pemustaka menjadi lebih optimal, dan pada akhirnya mampu mendukung misi peningkatan literasi serta penguatan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 4. 12 Pendahuluan

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

3. Dewey Decimal Classification (DDC)

Bagian ini merupakan inti dari panduan yang menjelaskan secara komprehensif mengenai *Dewey Decimal Classification* (DDC) sebagai sistem klasifikasi internasional yang paling banyak digunakan di perpustakaan dunia. Dijabarkan bahwa DDC dikembangkan oleh Melvil Dewey sejak tahun 1876, dan bekerja dengan sistem angka desimal yang membagi seluruh bidang ilmu ke dalam sepuluh kelas utama (000–900), kemudian diturunkan menjadi divisi dan seksi yang lebih spesifik.

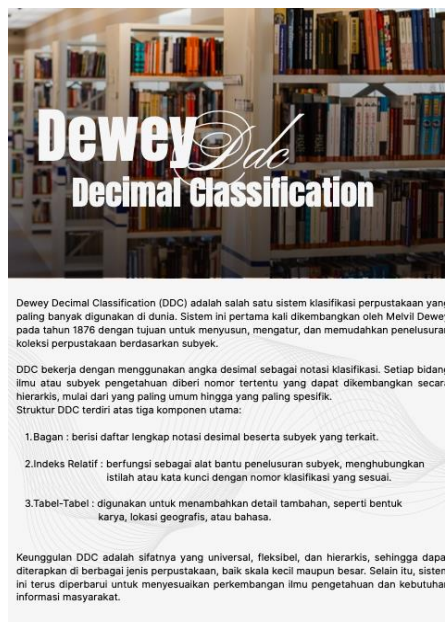
Penjelasan dalam bagian ini mencakup tiga komponen utama DDC:

1. Bagan – berisi daftar lengkap notasi beserta subjeknya secara hierarkis dari umum ke khusus.
2. Indeks Relatif – alat bantu untuk menemukan nomor klasifikasi melalui istilah alfabetis.

3. Tabel-Tabel Pembantu – digunakan untuk menambahkan rincian seperti bentuk karya, bahasa, lokasi geografis, atau kelompok masyarakat tertentu.

Setiap tabel dijelaskan dengan contoh konkret, seperti penggunaan *Tabel 2* untuk menambahkan unsur geografis ($780 \text{ Musik} + T2-598 = 780.598 \text{ Musik Indonesia}$) atau *Tabel 1* untuk aspek bentuk karya ($780 \text{ Musik} + T1-09 = 780.09 \text{ Sejarahmusik}$).

Dengan uraian tersebut, pustakawan diharapkan memahami struktur dan prinsip dasar DDC agar dapat menerapkannya dengan tepat pada berbagai jenis koleksi.



Gambar 4. 13 Dewey Decimal Classification

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

4. Penggunaan DDC sebagai Klasifikasi

Bagian ini memuat panduan teknis langkah demi langkah dalam menerapkan sistem DDC di lapangan. Dimulai dari persiapan klasifikasi, pustakawan diarahkan untuk menyiapkan edisi terbaru DDC, indeks relatif, tabel pembantu, data bibliografis, hingga sistem katalog.

Proses klasifikasi dijelaskan secara runtut melalui tujuh tahapan utama:

1. Analisis isi dokumen untuk menentukan subjek utama.
2. Pencarian istilah di Indeks Relatif.
3. Verifikasi hasil pencarian melalui Bagan DDC.
4. Penggunaan Tabel Pembantu untuk menambahkan detail tambahan.
5. Penyusunan nomor klasifikasi akhir.
6. Penambahan *Cutter number* dan tahun terbit sebagai pembeda koleksi.
7. Pencatatan dalam katalog dan pelabelan fisik pada punggung buku.

Untuk memperjelas penerapan di lapangan, bagian ini juga dilengkapi contoh simulasi klasifikasi pada buku *Sejarah Musik Jazz di Indonesia*, yang menunjukkan langkah konkret dari analisis subjek hingga terbentuknya nomor klasifikasi akhir:

781.6509598 S45 2023, yang berarti: *Musik Jazz – Aspek Sejarah – Indonesia – Pengarang Suryanto – Tahun 2023*.

Melalui contoh ini, pustakawan dapat memahami cara kerja DDC secara aplikatif dan presisi.



Gambar 4. 14 Penggunaan DDC sebagai klasifikasi

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

5. Kesimpulan

Bagian kesimpulan menegaskan kembali pentingnya klasifikasi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. DDC dipaparkan sebagai sistem yang bersifat universal, fleksibel, dan hierarkis, sehingga mampu digunakan di berbagai jenis perpustakaan. Tiga komponen utamanya Bagan, Indeks Relatif, dan Tabel Pembantu dijelaskan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi untuk menghasilkan nomor klasifikasi yang akurat dan konsisten. Kesimpulan juga menyoroti pentingnya penerapan DDC secara disiplin agar tata kelola koleksi menjadi lebih tertib, akses informasi semakin mudah, dan kualitas layanan meningkat.

Dengan adanya panduan ini, Perpustakaan Dinas Pend Provinsi Jawa Tengah diharapkan memiliki acuan kerja yang seragam, efektif, dan mendukung penguatan literasi serta pengembangan budaya baca di Masyarakat

Kesimpulan

Klasifikasi koleksi bahan pustaka merupakan elemen mendasar dalam pengelolaan perpustakaan karena menentukan bagaimana informasi dapat diakses dengan cepat, tepat, dan sistematis oleh pemustaka. Panduan ini menegaskan bahwa penggunaan Dewey Decimal Classification (DDC) sebagai standar internasional memberikan kerangka yang universal, hierarkis, dan fleksibel sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis perpustakaan.

DDC terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Bagan, Indeks Relatif, dan Tabel Pembantu, yang secara bersama-sama memudahkan pustakawan dalam menentukan nomor klasifikasi yang paling sesuai dengan subjek koleksi. Melalui bagan, koleksi diorganisasi ke dalam sepuluh kelas utama ilmu pengetahuan; melalui indeks relatif, istilah dapat ditelusuri secara alfabetis; sedangkan tabel pembantu memberi rincian tambahan seperti bentuk, lokasi geografis, bahasa, maupun kelompok orang tertentu.

Agar proses klasifikasi berjalan efektif, pustakawan perlu melakukan persiapan, mulai dari analisis isi dokumen hingga pemanfaatan Cutter Number dan tahun terbit sebagai pembeda koleksi. Prosedur klasifikasi harus dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penentuan subjek dominan, pemilihan nomor klasifikasi, penambahan detail dengan tabel pembantu, hingga pencatatan ke katalog dan pemberian label fisik.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan perpustakaan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki pedoman praktis dan seragam dalam menerapkan sistem klasifikasi. Penerapan DDC secara konsisten tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola koleksi, tetapi juga memperkuat layanan informasi, mendukung pengembangan literasi, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan di lingkungan masyarakat.

Gambar 4. 15 Kesimpulan

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

4.6.3 Pasca Produksi

A. Tahap Validasi

Tahap Validasi dilakukan sebagai tahap akhir dalam proses pengembangan *Buku Panduan Klasifikasi Bahan Pustaka* untuk memastikan bahwa isi, sistematika, dan penerapan konsep klasifikasi sesuai dengan standar dan kebutuhan praktis di lingkungan perpustakaan dinas. Buku panduan ini dikembangkan untuk memberikan pedoman teknis bagi pustakawan dalam melakukan pengelompokan, penentuan notasi, serta penyusunan koleksi pustaka berdasarkan Dewey Decimal Classification (DDC) edisi ke-23. Melalui validasi ini, diharapkan panduan tersebut memenuhi kriteria sebagai dokumen acuan yang layak digunakan secara resmi dalam kegiatan teknis perpustakaan, serta dapat meningkatkan konsistensi dan efisiensi pengelolaan bahan pustaka di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan validasi ini bertujuan untuk menilai kualitas isi dan kelengkapan materi dalam buku panduan, Memastikan kesesuaian panduan dengan teori dan praktik klasifikasi bahan pustaka terkini, Mengevaluasi keterbacaan dan kejelasan bahasa agar mudah dipahami oleh pustakawan pengguna, Menguji aspek kegunaan dan kepraktisan panduan dalam

penerapan kegiatan sehari-hari di perpustakaan. Validasi dilakukan dengan dua validator ahli dengan dan latar belakang sebagai berikut :

1. Chaidir Amir, S.Sos., M.A - Pustakawan Ahli Madya. Jabatan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Arie Nugraha - Asisten Profesor di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

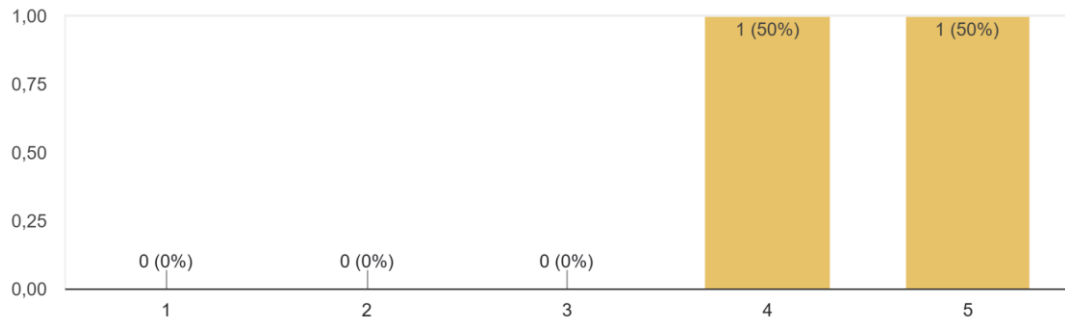
Proses validasi ahli dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berisi indikator penelitian dalam bentuk Google form yang naninya penulis akan memberikan ling tersebut kepada mereka. Hal in dilakukan karena adanya keterbatasan jarak. Oleh karena itu agar mempermudah proses validasi dilakukan penilaian melalui google form yang sudah dibuat oleh penulis. Proses penelitian terhadap buku Panduan dikategorikan sebagai berikut, antara lain kesesuaian isi dengan tujuan pembuatan panduan, kejelasan langkah-langkahpenggunaan slims, keterampilan ilustrasi, keterbacaan dan keseuaian bahasa dengan pengguna, kemenarikan design buku panduan.

1. Aspek Kelayakan Isi

Aspek kelayakan isi merupakan bagian paling mendasar dalam proses validasi buku panduan karena berhubungan langsung dengan ketepatan, kedalaman, dan relevansi materi yang disajikan terhadap tujuan penyusunan panduan. Pada tahap ini, para validator menilai sejauh mana isi buku panduan telah mencerminkan prinsip-prinsip ilmiah, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, serta keselarasan dengan standar klasifikasi bahan pustaka yang berlaku secara nasional maupun internasional. Secara umum, hasil validasi menunjukkan bahwa isi buku panduan memperoleh rata-rata skor sebesar 85% dengan kategori **“Layak”**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa buku panduan telah memenuhi aspek kelayakan isi dengan sangat baik.

2. Isi panduan memuat informasi yang benar, akurat, dan sesuai.

2 jawaban



Gambar 4. 16 Grafik kelayakan isi

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

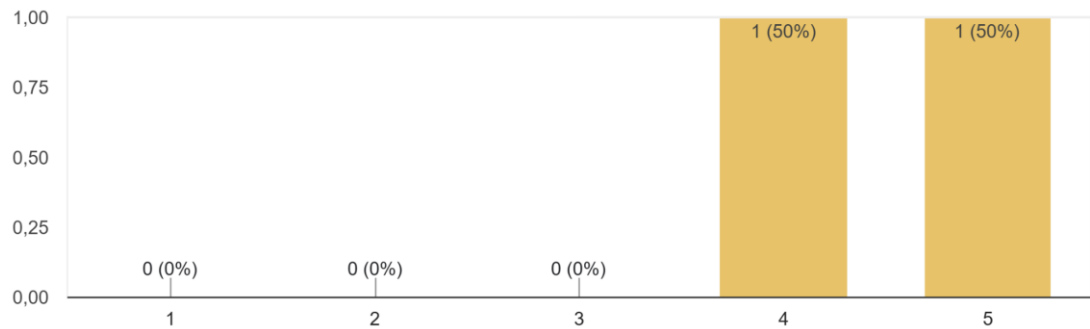
2. Aspek Kelayakan Bahasa

Aspek kelayakan bahasa merupakan bagian penting dalam proses validasi buku panduan karena bahasa memiliki peran utama dalam menentukan sejauh mana isi panduan dapat dipahami, diterapkan, dan digunakan secara efektif oleh pembaca dalam hal ini para pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan. Bahasa yang baik, jelas, dan komunikatif akan memudahkan pengguna memahami konsep klasifikasi bahan pustaka yang dijelaskan, sedangkan penggunaan istilah yang tidak konsisten atau terlalu teknis dapat menimbulkan salah tafsir dalam penerapan di lapangan.

Berdasarkan hasil penilaian dari para validator, aspek kelayakan bahasa dalam Buku Panduan Klasifikasi Bahan Pustaka pada Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor rata-rata sebesar 89%, yang termasuk dalam kategori “**Layak**”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum bahasa yang digunakan dalam buku panduan sudah baik dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, namun masih terdapat beberapa bagian yang perlu disempurnakan agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan pengguna.

5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.

2 jawaban



Gambar 4. 17 Grafik kelayakan Bahasa

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

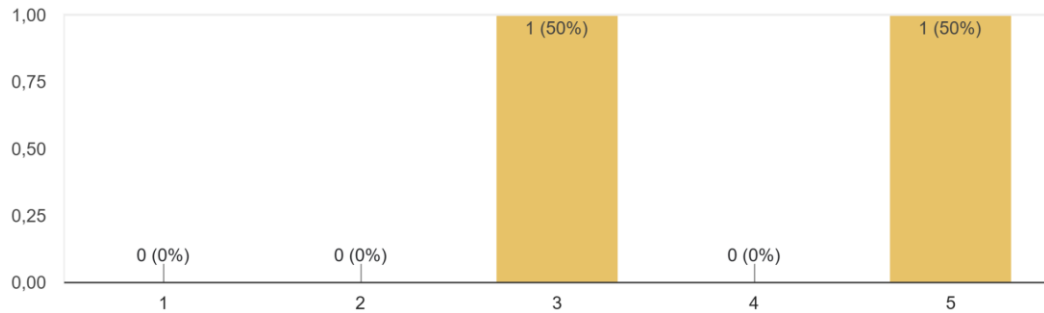
3. Aspek Kelayakan Penyajian dan Design

Aspek kelayakan penyajian dan desain berfokus pada cara buku panduan disusun, disajikan, dan dirancang secara visual agar memudahkan pengguna dalam memahami isi serta menerapkan panduan secara praktis. Dalam konteks buku panduan teknis, penyajian dan desain yang baik menjadi faktor penting karena tidak hanya memengaruhi tingkat keterbacaan, tetapi juga efektivitas penggunaannya di lapangan.

Berdasarkan hasil penilaian para validator, aspek penyajian dan desain dalam Buku Panduan Klasifikasi Bahan Pustaka pada Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor rata-rata sebesar 80%, yang termasuk dalam kategori “**Layak**”. Hal ini menunjukkan bahwa buku panduan sudah disusun dengan sistematika yang baik, didukung desain visual yang cukup menarik dan fungsional.

12. Desain visual menarik, rapi, dan profesional sebagai buku panduan.

2 jawaban



Gambar 4. 18 Grafik kelayakan desain

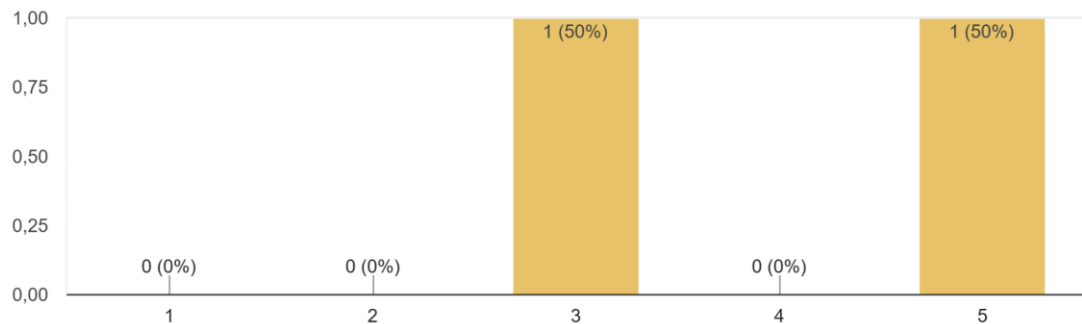
Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

4. Aspek Kelayakan Kegunaan

Aspek kelayakan kegunaan (*usability*) merupakan komponen penting dalam validasi karena menilai sejauh mana buku panduan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan bermanfaat oleh pengguna sasaran. Dalam konteks ini, pengguna utama adalah pustakawan, staf pengelola koleksi, serta tenaga teknis perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Kelayakan kegunaan mencakup kemampuan panduan dalam memberikan kemudahan penerapan di lapangan, tingkat kemanfaatannya terhadap peningkatan kinerja pustakawan, serta kontribusinya dalam mendukung standarisasi pengelolaan bahan pustaka di tingkat instansi. Berdasarkan hasil penilaian para validator, aspek kelayakan kegunaan memperoleh skor rata-rata sebesar 85%, dengan kategori “**Layak**”. Nilai ini menunjukkan bahwa buku panduan tidak hanya layak secara isi dan penyajian, tetapi juga bermanfaat secara praktis dan aplikatif bagi pengelolaan perpustakaan.

15. Buku panduan layak digunakan sebagai media pelatihan atau referensi kerja di perpustakaan.
2 jawaban



Gambar 4. 19 Grafik Kelayakan referensi kerja

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)

5. Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh para ahli terhadap buku panduan yang dikembangkan, diperoleh sejumlah saran dan masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk agar lebih layak digunakan. Secara umum, validator memberikan penilaian positif terhadap isi, tampilan, dan sistematika buku panduan. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal. validator memberikan beberapa saran pengembangan antara lain:

1. Arie Nugrah : “perlu dilakukan untuk penambahan informasi mengenai copy cataloging”
2. Chaidir Amir: “disarankan untuk mengembangkan isi buku panduan agar panduan bisa menjadi buku panduan yang lebih detail dan juga komprehensif.”

6. Kesimpulan Hasil Validasi

Berdasarkan hasil validasi para ahli, buku panduan klasifikasi dinyatakan layak digunakan dengan kategori valid. Dari aspek isi, materi telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, akurat, dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan jelas, komunikatif, dan sesuai kaidah yang berlaku. Tampilan buku menarik serta mendukung pemahaman

konsep klasifikasi melalui ilustrasi dan contoh yang relevan. Dari segi kegunaan, panduan ini mudah diterapkan dan membantu pengguna dalam memahami langkah-langkah klasifikasi secara sistematis. Dengan demikian, buku panduan klasifikasi siap digunakan setelah dilakukan revisi kecil sesuai saran validator.

B. Tahap sosialisasi

Tahap sosialisasi merupakan bagian akhir dari proses penyusunan Buku Panduan Klasifikasi Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap ini, penulis melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penjelasan langsung kepada staf pengelola perpustakaan mengenai isi serta penggunaan buku panduan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa panduan yang disusun dapat dipahami, diterapkan, serta memberikan manfaat nyata bagi kegiatan pengelolaan koleksi di lingkungan perpustakaan.

Kegiatan dilaksanakan di ruang layanan Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan dihadiri oleh beberapa staf pengelola perpustakaan. Penulis memulai kegiatan dengan memaparkan latar belakang pembuatan buku panduan, menjelaskan struktur isi, serta fungsi dari setiap bagian buku. Penjelasan dimulai dari pengantar sistem Dewey Decimal Classification (DDC), prinsip pengelompokan ilmu pengetahuan ke dalam sepuluh kelas utama, hingga cara penggunaan bagan, indeks relatif, dan tabel pembantu (*auxiliary tables*) dalam menentukan nomor klasifikasi yang tepat.

Penulis juga menunjukkan contoh penerapan klasifikasi berdasarkan kasus nyata yang sering ditemui di perpustakaan, seperti klasifikasi koleksi mengenai sejarah daerah, kebudayaan, dan kesenian. Penjelasan dilakukan secara interaktif melalui sesi tanya jawab dengan dua staf pengelola, yaitu Ibu Purwati dan Ibu Marni.

Di tengah penjelasan, Ibu Purwati mengajukan pertanyaan,

“Contohnya, kalau buku-buku tentang budaya atau sejarah daerah, itu diklasifikasikan di nomor berapa, Mas? Soalnya kadang di DDC nggak ada subjek yang persis sama.”

Penulis menjawab dengan memberikan contoh penerapan,

“Untuk koleksi seperti itu, Bu, kita lihat dulu bidang ilmunya. Misalnya kalau tentang kesenian tradisional bisa dimasukkan ke 790 untuk seni pertunjukan. Setelah itu kita tambahkan notasi geografis dari Tabel 2 untuk wilayah Indonesia, yaitu 598, dan kalau mau lebih spesifik lagi untuk Jawa Tengah bisa pakai 5982. Jadi hasil akhirnya bisa jadi 790.5982 itu untuk kesenian daerah Jawa Tengah.”

Dari hasil kegiatan tersebut, Ibu Purwati menyampaikan bahwa penjelasan dalam buku panduan mudah dipahami dan aplikatif. Ia menilai panduan ini dapat membantu pustakawan dalam menentukan nomor klasifikasi secara lebih tepat dan konsisten. Selanjutnya, penulis melaksanakan sesi kedua bersama Ibu Marni. Penulis juga memperlihatkan contoh penerapan klasifikasi terhadap koleksi yang tersedia di perpustakaan.

Setelah penjelasan tersebut, Ibu Marni memberikan tanggapan bahwa metode tersebut cukup membantu dalam menentukan klasifikasi yang lebih tepat. Beliau juga menyampaikan saran agar buku panduan dilengkapi dengan contoh visual pendukung.

“Mungkin mas biar lebih mudah dipahami bisa juga disertai contoh foto atau ilustrasi, kayak nomor panggil buku dan susunan rak yang sudah diklasifikasikan,”

Penulis menanggapi bahwa saran tersebut sangat konstruktif dan akan dipertimbangkan untuk penyempurnaan buku panduan di kemudian hari, mengingat unsur visual dapat memperkuat pemahaman terhadap penerapan konsep klasifikasi.

Secara keseluruhan, kegiatan penjelasan yang dilakukan kepada Ibu Purwati dan Ibu Marni menunjukkan bahwa buku panduan ini dapat dipahami dengan baik oleh pengguna sasaran. Kedua staf menyatakan bahwa isi buku disusun secara singkat sistematis, menggunakan bahasa yang jelas, serta relevan dengan kebutuhan kerja di perpustakaan. Selain itu, keberadaan buku panduan ini dinilai mampu menjadi acuan praktis dalam menjaga konsistensi pengklasifikasian koleksi, terutama bagi pustakawan baru.

Penulis berharap buku panduan ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di lingkungan Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Melalui panduan ini, diharapkan proses klasifikasi koleksi dapat berlangsung secara lebih efisien, seragam, dan profesional, sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan informasi serta penguatan literasi masyarakat di tingkat provinsi.

Sebagai bentuk dokumentasi kegiatan pasca produksi, penulis melampirkan foto kegiatan yang memperlihatkan proses penjelasan kepada Ibu Purwati dan Ibu Marni secara terpisah. Foto tersebut menunjukkan suasana kegiatan yang berlangsung dengan komunikatif dan memberikan umpan balik terkait isi buku panduan.



Gambar 4. 20 Sosialisasi Ibu Purwati

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)



Gambar 4. 21 Sosialisasi Ibu Marni

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2025)